



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 1 Maret 2012
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Kesiapan PT. Jamsostek (Persero) dan sosialisasi UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menuju transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 2. <i>Roadmap</i> BPJS Ketenagakerjaan terkait data dan kepesertaan Jamsostek yang masih menjadi beban PT. Jamsostek (Persero). 3. Status dan kedudukan investasi PT. Jamsostek (Persero) pada berbagai instrumen investasi, sebelum dan sesudah transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Rapat	: Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 33 orang anggota dari 49 Anggota, 3 orang izin.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dibuka pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka persiapan dan kesiapan operasional termasuk petunjuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan program pemisahan asset BPJS Ketenagakerjaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum Publik (BHP) BPJS.